

Fiksasi Biru:

Membongkar Tabir Agenda Politik di Balik Janji Pertumbuhan Biru

Zoe W. Brent, Mads Barbesgaard, dan Carsten Pedersen



PENULIS: Zoe W. Brent, Mads Barbesgaard, dan Carsten Pedersen

PEMERIKSA NASKAH: Ann Doherty

DESAIN: Bas Coenegracht

KREDIT FOTO: NOAA National Ocean Service; Ben Turner; Carsten ten Brink; dan Askjell Raudøy

Diterbitkan oleh Transnational Institute - www.tni.org

Amsterdam, October 2018

Isi laporan ini dapat dikutip atau direproduksi untuk tujuan non-komersial, selama sumber informasi dikutip dengan benar. TNI akan menghargai jika bisa menerima salinan atau tautan dari teks di mana dokumen ini digunakan atau dikutip. Harap dicatat bahwa untuk beberapa gambar, hak cipta mungkin berada di tempat lain dan ketentuan hak cipta dari gambar tersebut harus didasarkan pada ketentuan hak cipta dari sumber aslinya.

<http://www.tni.org/copyright>

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis sangat berterima kasih kepada Jennifer Silver dan Irmak Ertör atas komentar mereka yang berarti pada versi sebelumnya, dan kepada rekan-rekan kami di tim Keadilan Agraria dan Lingkungan di TNI untuk saran dan masukan mereka yang bermanfaat dalam penelitian dan penulisan. Kesalahan lainnya yang ada merupakan milik kami sendiri.

Pengantar

Berbagai cara orang untuk menggunakan, memanfaatkan, menjaga dan terlibat dengan ruang laut telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang abad yang lalu. Dahulu, lautan utamanya dilihat —dan diatur—sebagai jalur lintasan permukaan untuk pengiriman barang-barang. Hari ini, sebagian karena kemajuan teknologi dan metode baru yang tersedia untuk mengekstraksi kekayaan dari laut, maka lautan pun dibingkai ulang—dan diatur ulang—sebagai ruang bagi ‘ekonomi biru’. Dan yang lebih penting, para pendukung pertumbuhan ‘kebiru-biruan’ ini menjanjikan keberhasilan hingga tiga kali lipat di bidang ekologi, sosial dan ekonomi.

Dalam laporan singkat ini, kita akan mengungkap agenda politik di balik janji ‘pertumbuhan biru’. Temuan kami bahwa narasi mengenai pertumbuhan biru, ekonomi biru, revolusi biru, dan sejenisnya adalah seperti minuman oplosan yang tercampur dengan sangat kuat dan keras. Pertama, wacana ini memuaskan dahaga sosial atas aksi nyata dalam menghadapi dampak perubahan iklim dengan menarik investasi swasta dalam kawasan perlindungan konservasi laut dan pariwisata yang berkelanjutan. Kedua, agenda ini memenuhi kebutuhan dunia yang semakin meningkat atas pangan yang sehat dan bergizi melalui ekspansi budidaya perikanan skala-besar yang padat modal, selagi berusaha menghilangkan dampak sosial-ekologi negatif dari teknologi ini. Dan pada akhirnya, hal tersebut menyegarkan cita rasa dengan hembusan energi angin dan percikan sumber daya mineral laut dalam yang baru tanpa mengganggu sensasi rasa dan aroma yang akrab serta kuat dari minyak dan gas.

Komposisi bahan oplosan tersebut yang menjadi subyek bahasan dari laporan singkat ini, dan tujuan kami adalah untuk menggali fungsi dari masing-masing bahan oplosan tersebut. Dengan demikian, kami berharap dapat memberikan analisis kritis terhadap kepentingan dan agenda yang ada di belakang pertumbuhan biru, serta implikasinya dari arah gejala ini. Kami tidak dapat sepenuhnya mengeksplorasi berbagai dimensi dan sektor dari lingkungan laut yang sangat luas dalam laporan yang singkat ini.¹ Sebagai gantinya, kami berfokus pada apa yang kami lihat sebagai tiga bagian inti, yang masing-masing memiliki sejarah dan jejaknya sendiri sebelum pertumbuhan biru menjadi kata kunci. Namun apa yang membuat oplosan ini begitu kuat adalah sinergi dari ketiga elemen, yang disatukan dalam satu kerangka yang elok untuk membingkai ulang politik kelautan sehingga dapat didukung oleh banyak pemangku kepentingan. Fiksasi biru ini terbuat dari tiga bahan pokok utama:²

- 1 bagian fiksasi konservasi
- 1 bagian fiksasi protein
- 1 bagian fiksasi energi/ekstraktif

Istilah fiksasi sangat berguna karena makna gandanya membawa ketergantungan terhadap model ekstraksi dan produksi tertentu. Istilah ini juga menjelaskan bagaimana konfigurasi modal tetap dalam bentuk infrastruktur dan investasi baru di tempat-tempat khusus (misalnya: pelabuhan, hotel mewah, pengeboran minyak dan kapal kargo) ‘fiksasi’ atau menanamkan modal uang yang terakumulasi nilai lebih menjadi obyek fisik. Modal tetap juga menciptakan peluang baru bagi sirkulasi modal dalam bentuk lainnya (uang, komoditas) di tempat-tempat yang baru dengan cara-cara yang baru pula (misalnya investasi di wilayah atau negara-negara yang baru, atau sektor-sektor yang baru seperti pertambangan di laut dalam). Pada saat krisis, ini menciptakan ‘fiksasi’ sementara, atau solusi, untuk apa pun yang mungkin dapat menghambat akumulasi modal (penciptaan surplus keuntungan berdasarkan investasi). Kami juga menggunakan istilah ‘fiksasi’ untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan biru secara stimulan merupakan upaya mengintai peluang akumulasi modal baru dan di saat yang bersamaan mengakomodasi pembentukan modal tetap yang telah ada (yaitu, investasi yang riil seperti pelabuhan).

Meskipun penting untuk melacak wacana pertumbuhan biru, seperti halnya mereka yang telah memulai lebih dulu,³ energi yang diperlukan untuk mengikuti permainan kata-kata biru berikutnya juga membantu mengaburkan fakta bahwa jika dilihat secara serius, ekonomi biru memiliki implikasi yang sangat nyata terhadap bagaimana distribusi akses terhadap dan kontrol atas ruang laut, dan bagi mereka yang terlibat ataupun dikecualikan dari proses dan politik yang berjalan ini. Dalam euforia perayaan keberhasilan diri sendiri setelah forum biru —di mana pembuat kebijakan bersulang dengan para penanam modal, LSM konservasi dan perusahaan energi angin raksasa sebelum menelan dimulainya ‘fiksasi biru’ ini — ada kecenderungan untuk mengabaikan mabuk sosial dan ekologis yang mana sudah pasti disebabkan oleh oplosan ini.

Secara teori, melindungi wilayah laut adalah bagian penting dari mitigasi perubahan iklim. Namun pada praktiknya, apa yang dicapai oleh upaya konservasi di tingkat nasional dibayang-bayangi oleh kepentingan perluasan pengeboran minyak dan gas lepas pantai. Meskipun menekankan upaya transisi menuju energi angin dan tenaga surya, pertambangan mineral laut dalam dibutuhkan bagi teknologi baru

ini yang menjadikan kita berada di wilayah ekologis yang tidak diketahui dengan pemahaman minim akan dampak yang dapat terjadi. Akhirnya, penangkapan ikan skala kecil secara efektif dikucilkan, sementara penangkapan ikan skala industri terus memiliki posisi yang mapan dan

Menutup Ruang Laut

Selama ribuan tahun, nelayan skala-kecil di seluruh dunia telah menikmati akses istimewa terhadap sumber daya perikanan, serta aturan tradisional dan adat yang telah terbentuk dan mengakar di komunitas nelayan. Di Oceania, misalnya, laut diatur sebagai ruang yang terpadu dalam masyarakat, seperti halnya tanah.⁴ Seiring waktu, bagaimanapun, perkembangan pemanfaatan laut untuk menghasilkan keuntungan telah menjadi pendorong utama perubahan rezim pengaturan laut. Hasilnya, nelayan skala kecil semakin terdorong keluar dari ruang yang mereka tinggali dan hidup darinya sejak generasi ke generasi. Tren yang demikian, baru-baru ini menjadikan gerakan nelayan dunia membingkai perjuangan mereka pada konsep mengenai 'perampasan laut'.⁵ Penekanan tentang dinamika mengenai 'perampasan' baru-baru ini; secara khusus muncul dari pada yang disebut sebagai 'konvergensi atas krisis' (iklim, lingkungan, energi, pangan dan keuangan). Namun penutupan ruang laut dan pelembagaan rezim kepemilikan memungkinkan perampasan sumber daya laut oleh pengguna baru telah memiliki sejarah panjang.

Sebuah pergeseran besar dalam bagaimana tata kelola pengaturan laut berkembang sejak abad ke-17 dan terus berlanjut, dimana laut sebagai sarana transportasi untuk komoditas menjadi semakin penting untuk kapitalisme komersial.⁶ Sarana transportasi perhubungan menjadi pemanfaatan laut yang dominan, dan merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi dan kekuatan kolonial Eropa pada saat itu. Kepentingan politik dan ekonomi yang utama di lautan dulu kala adalah untuk mengendalikan dan memastikan jalur pelayaran bebas sepanjang rute perdagangan. Ketentuan politik-ekonomi ini membentuk pengaturan laut selama periode tersebut.⁷

Pada sekitar tahun 1990an, rezim yang dulunya berorientasi utama pada transportasi barang kemudian memberi jalan yang memfasilitasi ekstraksi atas sumber daya laut. Pengaturan ruang laut bergeser ke arah model teritorial/kewilayahan, di mana pemerintah semakin berusaha untuk menyatukan zona pesisir menjadi wilayah kedaulatan yang diakui untuk menjamin keamanan atas investasi dalam penangkapan ikan di pesisir dan ekstraksi mineral. Pada tahun 1930an, dimulai dari Teluk Meksiko pada tahun 1937,

bahkan meluas hingga menjadi pemasok pakan bagi industri perikanan budidaya dengan pakan ikan dari ikan pelagis kecil. Dampak sosial dan ekologis dari pergeseran ini jarang dibahas dalam kebijakan pertumbuhan biru.

pengeboran minyak lepas pantai dapat dilakukan di luar tiga mil laut yang pada saat itu diterima oleh sebagian besar negara sebagai zona teritorial.⁸

Pengembangan kemampuan pengeboran minyak lepas pantai tersebut menandai dimulainya model pengaturan berdasarkan pengendalian dan penutupan ruang laut oleh negara dan memungkinkan konsesi untuk dibagikan kepada industri ekstraktif. Pada awalnya dipicu oleh meningkatnya permintaan akan minyak bumi setelah Perang Dunia II, negara-negara mulai mengklaim hak kebangsaan atas sumber daya yang semakin dan semakin jauh dari pantai. Pada tahun 1945, Amerika Serikat mengklaim hak nasional yang terbatas pada sumber daya di seluruh landas kontinen yang berdekatan dengan garis pantainya,⁹ dan El Salvador menjadi negara pertama yang mengklaim kedaulatan atas kawasan yang membentang sejauh 20 mil dari garis pantai pada tahun 1950.

Pada upaya untuk koordinasi yang lebih baik dalam penguasaan wilayah teritorial atas laut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pertama kalinya menyelenggarakan dua Konferensi tentang Hukum Laut pada tahun 1958 dan 1960. Namun, baru pada Konferensi tentang Hukum Laut yang ke-3 pada tahun 1973 yang mendorong pengembangan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (the United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS). Konvensi ini, diratifikasi oleh 167 negara-negara dan Uni Eropa,¹⁰ mengakui hak-hak negara pantai untuk "memanfaatkan, mengembangkan, mengelola dan melestarikan semua sumber daya –perikanan atau minyak, gas atau bebatuan, nodul (bintal, atau butiran yang lebih besar dari bintil) atau belerang- yang dapat ditemukan di perairan, di dasar laut dan di tanah dari area yang membentang sejauh 200 mil dari pantai.¹¹

Ratifikasi UNCLOS tampak jelas menjadi penutupan terbesar ruang wilayah teritorial sepanjang sejarah.¹² Pada saat konferensi ketiga di tahun 1973, sebanyak 25 negara mempertahankan klaim atas zona 3 mil laut; 15 negara menyatakan zona antara 4 – 10 mil; 66 negara menyatakan zona 12 mil; dan satu negara mendorong zona 200 mil.¹³ Sementara pembatasan ruang teritorial ini signifikan, mereka dikerdilkan dengan perbandingan terhadap 659.662

kilometer (setara dengan 66% dari luas total wilayah teritorial daratan) dari Zona Ekonomi Eksklusif yang tertutup melalui UNCLOS.¹⁴ UNCLOS dengan demikian melembagakan fiksasi ruang untuk merekonsiliasi kepentingan yang berlawanan di antara penggunaan ruang laut yang berbeda: di satu sisi memfasilitasi arus bebas komoditas dan menyediakan akses atas pasar yang berjarak jauh, dan di sisi lain memberikan batasan wilayah daerah hak kepemilikan untuk memperkenankan bagi investasi tetap.¹⁵ UNCLOS

Janji Pertumbuhan Biru

Seiring dengan meningkatnya kepentingan terhadap laut, demikian juga kekhawatiran tentang bagaimana mengatur penggunaan ruang laut yang semakin penuh sesak serta hal-hal di sekitar dampak perubahan iklim terhadap penurunan ketersediaan ikan dan lingkungan laut. Dalam konteks upaya untuk memajukan agenda pembangunan berkelanjutan terhadap gagasan 'pertumbuhan hijau', Konferensi Rio +20 pada tahun 2012 (kelanjutan dari KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992), secara meyakinkan berhasil menempatkan laut menjadi bagian dari agenda internasional. Deklarasi Laut Rio, yang dikeluarkan pada Hari Kelautan pada Rio+20 oleh ketua-bersama konferensi, menyatakan "dengan kekhawatiran yang besar akan banyaknya ancaman dan poros penggerak negatif yang mengorbankan kemampuan laut untuk terus menyediakan sumber daya esensial, keamanan pangan dan gizi, dan jasa penting yang kritis bagi masyarakat dunia". Yang kemudian memperpanjang serangkaian daftar sejumlah ancaman yang dikenali, termasuk perubahan iklim, pengasaman laut, pencemaran, penangkapan ikan berlebihan, kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum (*illegal*)—tidak diatur dalam peraturan yang ada (*unregulated*) dan tidak dilaporkan pada pejabat yang berwenang (*unreported*) (IUU Fishing), praktik-praktik penangkapan ikan yang merusak dan pengrusakan habitat serta penurunan kualitas sumber daya.¹⁸

Sebuah analisis pada sesi resmi dan agenda sandingan (side event) di Rio +20 menunjukkan bahwa istilah "ekonomi biru secara konsisten digunakan untuk menarik perhatian pada kelautan"¹⁹ oleh berbagai aktor, termasuk perwakilan antara organisasi antar-pemerintah seperti FAO (Food and Agriculture Organization/Organisasi Pangan dan Pertanian PBB) dan UNDP (United Nations Development Program/Program Pembangunan PBB), perwakilan dari Negara-Negara Berkembang Pulau-Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) dan organisasi-organisasi konservasi. Silver dan rekannya mencatat bahwa "saat memperdebatkan permasalahan khusus kelautan, solusi dan peserta, banyak

memastikan "zona pesisir yang diatur secara teritorial untuk investasi tetap dan ekstraksi sumber daya serta perairan laut dalam yang tidak diatur secara kewilayahan teritorial yang didedikasikan untuk memfasilitasi sirkulasi arus modal,"¹⁶ Namun, teknologi baru dan terus meningkatnya upaya pencarian baru atas sumber daya di bawah kapitalisme berarti bahwa fiksasi tercapai melalui rezim UNCLOS hanya dalam waktu sekejap.¹⁷

pembicara [baik di forum resmi maupun side event] mengusahakan untuk memberikan lebih banyak makna yang lebih khusus dari istilah [ekonomi biru], yang seringkali dengan cara yang tidak konsisten dan tidak kompatibel".²⁰ Beberapa peserta menggunakan istilah itu untuk menggambarkan modal alamiah, atau nilai ekonomi dari sumber daya alam; yang lainnya bahkan lebih jauh lagi menggunakan istilah itu untuk 'menjual' gagasan tentang "kelautan sebagai bisnis yang baik"; dan beberapa negara SIDS menggunakannya secara strategis untuk menarik perhatian dan pendanaan serta mengidentifikasi beberapa mitra baru.

Upaya terkini untuk menggambarkan atau mendefinisikan pertumbuhan biru menunjukkan bahwa konsensus mengenai maknanya masih sulit dipahami, dan bahwa ada "beberapa konflik dalam penafsiran yang cenderung tidak dapat dikompromikan. Dengan demikian, setiap upaya untuk mendefinisikan Ekonomi Biru dapat menghasilkan [suatu] cara pandang khusus yang diistimewakan."²¹ Namun bagi Jacqueline Alder, yang memimpin gagasan pertumbuhan biru di FAO, ketidakjelasan ini memiliki nilai yang strategis. Dia menjelaskan: "[K]ami telah merancang program pertumbuhan biru kami, sejujurnya, untuk meluas, sehingga negara-negara dapat menentukan cara mana yang ingin ditempuh."²²

Dipicu pada Rio +20 di tahun 2012, pertumbuhan biru kemudian menyebar ke kancah internasional. Pemerintah dan institusi antar pemerintah, bersama dengan LSM lingkungan, akademisi, perusahaan-perusahaan dan lembaga keuangan, sejak saat itu telah mendorong serangkaian konferensi internasional dan menghasilkan laporan serta artikel yang tak terhitung jumlahnya, kerangka kebijakan antar-pemerintah dan strategi pertumbuhan biru di tingkat nasional. Memang, kebebasan dalam menafsirkan ini telah memicu beranak-pinaknya program dan kebijakan di tingkat nasional dan regional yang memanfaatkan bahasa ekonomi biru dan pertumbuhan biru (antara lain Norwegia, Uni Eropa, India, Afrika Selatan dan Indonesia). Pemerintah

dari beberapa negara telah bertindak demikian jauh untuk membentuk departemen atau kementerian untuk pertumbuhan maupun ekonomi biru.²³

Pada tahun 2013, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (UN Food and Agricultural Organisation/FAO) meluncurkan Gagasan Pertumbuhan Biru (Blue Growth Initiative/BGI). Kemudian diikuti dengan Global Oceans Action Summit pada tahun 2014 yang diselenggarakan bersama dengan FAO dan Bank Dunia, yang menghadirkan sekitar 600 perwakilan dari pemerintah, institusi antar-pemerintah, LSM lingkungan, organisasi kemanusiaan dan perusahaan sektor swasta untuk mendiskusikan pertumbuhan biru.²⁴ Peristiwa lainnya yang berhasil memajukan wacana pertumbuhan biru termasuk di antaranya adalah pertemuan tahunan Our Ocean Conference (yang awalnya diprakarsai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat), dan selanjutnya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2018; Konferensi PBB mengenai Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Framework Convention on Climate Change/UNFCCC); dan World Oceans Summit yang dinisiasi oleh the Economist. Adapun yang terakhir (World Oceans Summit) mengumpulkan pemimpin-pemimpin politik dan pembuat kebijakan, pemimpin bisnis global, ilmuwan, LSM dan multilateral serta fokus khususnya pada peluang investasi dan bisnis di wilayah perikanan tangkap dan budidaya, konservasi dan pariwisata.²⁵

Singkatnya, wacana ekonomi biru telah membuka ruang bagi koalisi yang lebih luas dan tidak tentu dari berbagai macam aktor dan agenda. Semua kebisingan sekitar pertumbuhan biru, ekonomi biru, revolusi biru, forum para penanaman modal/investor biru, karbon biru,

Fiksasi Konservasi

Agenda 21, sebagai hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) tahun 1992, secara luas bertujuan untuk mencapai 'pembangunan berkelanjutan'.²⁶ Bagian kelautan dari agenda ini melibatkan pembahasan tentang perlindungan laut, pemanfaatan dan pengelolaan berkelanjutan atas sumber daya hayati dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan di laut lepas, serta perubahan iklim.²⁷ Kendatipun tujuan ini mulia, emisi karbon yang terus-menerus mendorong terjadinya pengasaman laut, yang mengakibatkan pemutihan karang dan mengurangi populasi karang. Penangkapan ikan yang berlebihan dan pencemaran telah mengakibatkan cadangan stok ikan menurun drastis. Pulau-pulau plastik telah terbentuk di laut, bercampur dengan aliran agrokimia dari pertanian konvensional. Dan bahkan ketika pengeboran lepas pantai tidak menyebabkan tumpahan

pertambahan biru dan bahkan busana biru dapat memusingkan. Sebagian besarnya akan tetap menjadi kekinian dan sorotan, namun sejauh mana membanjirnya bahasa baru ini dapat menjadi seperangkat intrik dan tipu daya yang berguna untuk mengalihkan perhatian dari implikasi yang nyata terhadap wilayah, sosial dan ekologi dari tata susunan ini di antara persaingan industri kelautan yang baru, lama maupun saat ini, serta aktor-aktor yang mendorong konservasi skala-besar?

Untuk mengkaji konsekuensi nyata dari penerapan agenda pertumbuhan biru dan untuk menganalisis mengapa berbagai kepentingan tersebut dapat ditarik ke dalam pengaturan umum, beberapa bagian berikut ini menawarkan kajian awal terhadap tiga bahan baku utama yang menciptakan oplosan koktail dari fiksasi biru ini yaitu : (i) fiksasi konservasi; (ii) fiksasi protein; dan (iii) fiksasi energi/ekstraktif. Meskipun kami telah memisahkan ketiga elemen tersebut untuk tujuan analitis, pada praktiknya aroma dan prosesnya berbau serta saling tumpang tindih dalam cara-cara yang khusus secara kontekstual. Kami telah memasukkan beberapa kotak tentang berbagai kasus untuk menyoroti kekhususan tersebut. Tidak semua sektor kelautan mendapatkan perhatian yang layak sebagaimana seharusnya. Pelayaran dan kegiatan yang terkait dengan pelabuhan, misalnya, tentu pantas mendapat perhatian yang lebih dekat. Mereka juga tidak hanya memperhitungkan proporsi yang signifikan dari ekonomi kelautan yang signifikan, tapi juga diproyeksikan berada di antara sektor laut yang paling cepat berkembang dan dengan demikian tetap menjadi tulang punggung perdagangan global.

minyak, racun dari produk sampingan bocor ke perairan sekitarnya.²⁸ Terlepas dari tarikan situasi dan jangkauan dari gagasan global untuk mengatasinya, agenda pembangunan berkelanjutan telah gagal besar dari perspektif ekologi.

Meskipun agenda pembangunan berkelanjutan telah juga gagal untuk mendorong dukungan pendanaan, komitmen janji internasional untuk upaya konservasi dan pembangunan berkelanjutan terus berlanjut beranak-pinak: misalnya target Aichi dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) dan Target Pembangunan Berkelanjutan (UN Sustainable Development Goals/SDGs). Perubahan iklim sedang berkembang menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, tapi pada praktiknya komitmen pembiayaan yang nyata dari pemerintah nasional dan donor tertinggal jauh dari perkiraan pembiayaan yang



dibutuhkan untuk memenuhi target global tersebut. Untuk mengatasi kesenjangan dari pendanaan ini, LSM seperti WWF berpendapat bahwa modal dari sektor swasta adalah hal yang penting: "Sektor swasta akan mampu membuat target SDGs ini terpecahkan."²⁹

Masalahnya: tujuan dari investor adalah untuk mencari peluang menghasilkan keuntungan dan perlindungan lingkungan yang menjadi tuntutan publik nampaknya akan dikesampingkan. **Fiksasi konservasi:** mengubah konservasi laut menjadi upaya untuk menarik peluang investasi sembari meningkatkan hubungan masyarakat.

Pembingkaiannya upaya konservasi laut dalam agenda pertumbuhan biru sesuai dengan bentuk yang dipelopori oleh aliran utama konservasi selama dua dekade terakhir. Apa yang disebut oleh beberapa orang sebagai 'konservasi untuk laba keuntungan' berdasarkan pada gagasan "cara efisien secara ekonomis untuk mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi".³⁰ Pada intinya, hal ini mengikuti alasan dari paradigma environmentalisme berbasis pasar: degradasi lingkungan dan perubahan iklim dilihat sebagai kegagalan pasar, karena alam tetap tidak cukup untuk diintegrasikan pada sistem pasar.³¹ Dari perspektif ini, solusinya adalah menjadikan alam dapat terlihat dan terbuka untuk modal.³² Berdasarkan anggapan ini, begitu nilai ekonomi dari 'alam' dan 'jasa ekosistem'nya terdokumentasikan, kepala negara, pejabat direktur utama perusahaan

transnasional, para investor dan setiap orang lainnya akan memperhitungkan faktor biaya tersebut pada keputusan mereka dan menghentikan pengrusakan alam.

Lebih lanjut, "menjual alam untuk menyelamatkannya"³³ merelakan konservasi untuk membayarnya.³⁴ Pendekatan ini bergantung pada identifikasi peluang untuk menghasilkan uang pada proyek konservasi yang bisa diubah menjadi aset. Diharapkan bahwa taktik ini akan memberikan nilai imbal investasi (return on investment/ROI). Metode perlindungan lingkungan ini secara efektif mengalihkan prioritas yang jauh dari upaya yang paling mendesak untuk mengatasi krisis ekologis, yang mungkin bertentangan dengan kepentingan industri yang besar. Sebaliknya, konservasi dibingkai menjadi pelengkap untuk dan sesuatu yang akan dikembangkan dalam kemitraan yang erat dengan kepentingan bisnis. Seperti dikutip dari WWF: "Pencapaian SDGs mewakili suatu peluang bisnis. Kemiskinan, ketimpangan, kelangkaan air, perubahan iklim dan degradasi sumber daya alam serta layanan publik pada akhirnya buruk juga untuk bisnis. Sebaliknya, berinvestasi dalam pertemuan SDGs dapat membuka peluang dan pasar baru serta mengamankan kesejahteraan perusahaan jangka panjang."³⁵ Agenda pertumbuhan biru telah terjalin secara mulus ke dalam SDGs, dengan fokus khusus pada target 14: "Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan." Target ini, bersamaan dengan target Aichi untuk melindungi lebih dari 10% wilayah perairan

KOTAK 1

Operasi Phakisa, Afrika Selatan: Kawasan Konservasi Laut, minyak dan gas. . . tapi tidak nelayan skala kecil

Operasi phakisa berarti 'percepat' dalam bahasa Sesotho. Diluncurkan oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma pada Juli 2014, dengan kata-katanya sendiri untuk "membantu kami melaksanakan Rencana Pembangunan Nasional yang bertujuan akhir mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan".⁴⁹ Dalam sebuah pengumuman mengenai Forum Ekonomi Biru Afrika yang baru, mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika (UN Economic Commission for Africa) juga menyoroti operasi Phakisa dan menggemakan harapan yang dibangun oleh pemerintah Afrika Selatan dengan rujukan untuk menciptakan "satu juta pekerjaan baru pada tahun 2030 dan menambahkan 177 milyar ZAR [setara dengan 10,2 milyar Poundsterling] ke PDB negara."⁵⁰ Namun, Thean Potgieter, profesor di Wits School of Governance, tampak kurang optimis, yang menyatakan bahwa "bahkan jika bisa mencapai setengah dari target ini akan sangat bagus."⁵¹

Berlebihan atau tidak, jumlah besar ini dihitung dari prospek pembangunan di empat sektor utama Operasi Phakisa: pengeboran minyak dan gas lepas pantai, transportasi laut (termasuk pembangunan pelabuhan); industri perikanan budidaya (terutama spesies ekspor bernilai tinggi); dan jasa perlindungan laut (dilindungi melalui kawasan konservasi laut) dan pariwisata. Ketika rencana ruang lingkup dan pembangunan dari Operasi Phakisa menjadi lebih jelas bagi masyarakat umum dan masyarakat nelayan, para pelaku yang sebelumnya tidak termasuk dalam dialog kebijakan mulai bereaksi. Pada tahun 2017, gerakan nelayan Coastal Links menjadi tuan rumah pertemuan dengan organisasi masyarakat sipil dengan menyampaikan dua alasan keprihatinan: pertama, rencana pembangunan wilayah pesisir tidak membahas hak dan kebutuhan masyarakat nelayan dalam kaitannya dengan Operasi Phakisa; dan kedua, RUU tentang Perencanaan Tata Ruang Laut yang diajukan di Parlemen gagal menyediakan mekanisme yang akan memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana tersebut. Selanjutnya, rancangan peraturan untuk 22 Kawasan Konservasi Laut baru yang diumumkan oleh pemerintah pada tahun 2016 bersisian dengan visi pengeboran 30 sumur minyak lepas pantai baru dalam 10 tahun ke depan⁵² sebagai bagian dari Operasi Phakisa.

teritorial pada tahun 2020, telah mendorong pemerintah negara-negara untuk lebih mengembangkan pandangan untuk mengkawinkan antara peluang untuk perusahaan dan investor dengan upaya konservasi laut. Kawasan Konservasi Perlindungan Laut, khususnya yang besarnya mencapai 100,000 kilometer persegi, telah muncul menjadi salah satu solusi utama untuk tantangan ini dan telah menjadi daya tarik sejak tahun 2006.³⁶ Komisi Uni Eropa juga telah menyoroti fokus pada perubahan iklim melalui kawasan konservasi laut dalam kerjanya terkait dengan pertumbuhan biru. Menurut sebuah rangkuman artikel dalam publikasi Komisi Uni Eropa dari Our Ocean Conference yang diselenggarakan pada tahun 2017 di Malta: "[Iklim] adalah area aksi yang diambil oleh Uni Eropa secara serius, jadi Our Ocean adalah tempat yang cocok untuk mengumumkan pendanaan baru sebesar €20 juta untuk mendukung wilayah konservasi laut di Afrika, negara-negara Karibia dan Pasifik melalui Program Pengelolaan Kawasan

Keanekaragaman Hayati dan Kawasan Lindung. Bersama dengan Jerman, akan ada lebih banyak dukungan baru yang lintas sektoral dan lintas batas dengan platform multi-pe-mangku pihak yang akan berjalan pada tahun 2020."³⁷

LSM lingkungan yang besar dan organisasi kemanusiaan juga turut serta: proyek National Geographic's Pristine Seas, proyek Pew Charitable Trusts' Pew Bertarelli Ocean Legacy, dan program Conservation International's Seascapes telah menjadi pusat untuk membangun 22 Kawasan Konservasi Laut besar secara global, dengan berkolaborasi bersama pemerintah negara.³⁸ Dan berbagai bank swasta seperti Credit Suisse telah bergabung dengan WWF untuk menjadikan konservasi sebagai peluang investasi yang menarik. Mereka melihat peluang untuk menghasilkan uang yang datang dari "[i]nvestasi pada infrastruktur dan layanan pengelolaan berkelanjutan dari jasa ekosistem, misalnya, berinvestasi untuk penginapan dan jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekowisata atau dalam susunan panel

surya untuk pembangkit listrik, atau monetisasi jasa ekosistem (misalnya perlindungan daerah aliran sungai) dan barang-barang yang berasal dari usaha atas hutan, pertanian atau budidaya perikanan yang berkelanjutan.³⁹

Menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development), pariwisata mewakili 26% dari nilai tambah terhadap ekonomi kelautan di tahun 2010, hanya mampu dilampaui oleh pertambangan minyak dan gas lepas pantai. Meskipun sebuah kajian menyeluruh atas berbagai dampak pariwisata dalam kerangka ekonomi biru melampaui ruang lingkup dari laporan ini, di sini kami menyoro-ti bahwa jalan tersebut telah digunakan untuk membuat bentuk bagi investasi swasta dalam upaya konservasi laut. Para blogger Bank Dunia menyuarakan kepentingan mer-ekasebagai berikut:

Jelas bahwa alam merupakan fondasi bagi sebagian besar dari pariwisata di dunia –para pelancong ber-sedia membayar lebih untuk sebuah kamar dengan pemandangan laut, dan kata-kata seperti “asli”, “ter-pencil” dan “belum terjamah” seringkali dilekatkan pada fasilitas seperti pantai, terumbu karang dan pemandangan laut yang indah. Pun, ketergantungan industri perjalanan dan pariwisata terhadap lingkun-gan yang sehat jauh lebih dalam dari itu. Terumbu karang tidak hanya memberikan nilai hiburan bagi para pengunjung pantai, tapi juga dapat mengalih-kan gelombang yang menyebabkan erosi dan men-gurangi risiko gelombang badai yang dapat memba-hayakan inti utama dari industri ini.⁴⁰

Untuk memperkuat argumen ini, the Nature Conservancy telah bermitra dengan Bank Dunia dalam sebuah inisiatif yang disebut dengan Mapping Ocean Wealth (Pemetaan Kekayaan Lautan). Mereka mengklaim bahwa “Pengeta-huan ini dapat memungkinkan investasi yang lebih cerdas dalam tindakan pengelolaan dan konservasi serta sekaligus mendukung alam dan bisnis pariwisata yang mendukung ekonomi pesisir.”⁴¹ Menghitung potensi imbal balik dilihat sebagai suatu hal penting dalam merekrut penanam modal. Dalam kehebohan menghitung kekayaan alam di lautan, pertanyaan krusial mengenai apakah keuntungan upaya konservasi akan betul-betul mengatasi masalah ekologis dan sosial yang mengerikan di lautan dan di wilayah pesisir yang dikesampingkan.

Setelah investor yakin akan potensi keuntungan, mekanisme yang diterapkan untuk menyalurkan dana sangat beragam dan membutuhkan pengawasan yang lebih mendalam. Mis-alnya termasuk obligasi biru,⁴² Financial Instruments for

the Recovery of Marine Ecosystems/Instrumen Keuangan WWF untuk Pemulihan Ekosistem Laut (FIRME) WWF,⁴³ dan pengaturan kelembagaan LMPA yang baru.⁴⁴

Hal yang penting, mekanisme yang berkembang pesat dan rumit untuk menyalurkan investasi swasta ke dalam upaya konservasi laut tidak melakukan apa pun untuk membatasi kegiatan yang membahayakan lingkungan hidup di nega-ra-negara tersebut. Perbankan seperti JP Morgan dan Credit Suisse tampaknya lebih dikendalikan oleh tingginya imbal balik yang mereka lihat dalam obligasi hijau dan pembiayaan konservasi ketimbang oleh investasi untuk tujuan yang baik. “Secara umum, mereka menginvestasikan lebih banyak pada industri pencemaran, seperti pematihan hidraulik dan ek-straksi pasir minyak (aspal mentah).”⁴⁵ Sementara itu, Sey-chelles telah menetapkan zona tanpa kegiatan penangka-pan ikan, namun terus mengizinkan eksplorasi minyak di Kawasan Perlindungan Laut (Marine Protected Area/MPA) dan pembangunan angkatan laut India di dalam area Situs Warisan Dunia (World Heritage Site).⁴⁶

Mengingat rekam jejak yang naik turun, mungkin kelihatannya mudah untuk mengabaikan ‘pembiayaan biru’ sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan. Namun dalam konteks ru-ang laut, reformasi pengaturan yang dimulai untuk mem-fasilitasi konservasi untuk-laba keuntungan sangat penting karena mereka menindaklanjuti proses-proses penutupan ruang laut yang bersejarah dan memberikan LSM peran yang penting dalam tata kelola Kawasan Konservasi Laut. Sementara beberapa pihak melihat kurangnya kepemilikan pribadi/privat dalam banyak ruang laut sebagai batasan untuk menghasilkan laba, “inisiatif pengaturan lautan skala besar dibangun di sekitar Rencana Tata Ruang Laut (Marine Spatial Planning/MSP) dan/atau Kawasan Konservasi Laut dan/atau Kawasan Konservasi Laut Skala Luas (Large Marine Protected Area/LMPAs) yang hanya dilihat sebagai peleng-kap untuk menyelesaikan pertanyaan tentang kepemilikan, dalam arti bahwa mereka berusaha untuk memesan atau-pun menjajah sumber daya dan ruang laut, mengidentifikasi pemanfaatan/pengguna yang ‘tepat’, dan menjamin mereka kepastian pengaturan yang lebih besar dan/atau akses yang terjamin dan aman.”⁴⁷ Bahkan jika laba atas investasi di area konservasi laut tidak menghasilkan jumlah banyak di akhir, memperluas kendali hukum atas wilayah-wilayah tersebut untuk pelaku-pelaku konstelasi yang baru –termasuk LSM lingkungan, yayasan kemanusiaan/filantropis dan ‘investor dampak’ – mungkin berakhir menjadi jauh lebih menarik dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini adalah masalah yang patut dicermati pada tahun-tahun mendatang, karena area yang demikian luas akan berubah menjadi kawasan konservasi laut skala besar (LMPAS).⁴⁸

KOTAK 2

Kiribati: pertambangan bawah laut dalam dan Kawasan Konservasi Laut atas nama keberlanjutan

Presiden Kiribati sebelumnya, Anote Tong, dikenal di dunia internasional karena meletakkan konsekuensi dampak kenaikan permukaan air laut bagi negara-negara Kepulauan Pasifik dengan kuat dalam agenda internasional. Namun, solusi politiknya untuk masalah yang mengerikan ini dengan menggunakan kerangka ekonomi biru, dan baru-baru ini disebut 'perampasan dasar laut'.⁵³ Seperti yang dikatakan Tong kepada Majelis Umum PBB pada 2014, "lautan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan negara saya. Visi kami untuk mencapai pembangunan berkelanjutan bergantung pada ekonomi biru, pada konservasi dan pengelolaan sumber daya laut dan laut kami yang berkelanjutan.

Visi ekonomi biru ini juga telah melibatkan konsesi untuk pertambangan laut dalam di petak sebagian besar Zona Ekonomi Eksklusif dari Kiribati.⁵⁴ Sektor lain, seperti perikanan skala kecil, tidak ditampilkan sebagai bagian dari agenda ekonomi biru negara ini.⁵⁵ Meskipun dampak lingkungan masih kurang dipahami, sumber elemen kunci untuk turbin angin dan baterai fotovoltaik melalui pertambangan laut dalam dibingkai sebagai bagian dari sumber energi bersih baru-berbasis kan ekonomi biru. Dalam kata-kata seorang mantan menteri Kiribati: "[Pertambangan laut dalam], sungguh sebuah kisah yang ironis! Pertama-tama mereka memberi tahu kami bahwa kami memiliki masalah karena negara-negara Barat membakar terlalu banyak bahan bakar fosil yang tidak terbarukan dan sekarang negara-negara yang sama ingin mengambil mineral tidak terbarukan kami untuk menyelesaikan masalah?"⁵⁶ Kedua proyek ini didorong tanpa adanya konsultasi publik. Sebagaimana dicatat oleh pejabat publik, "semua kegiatan ini telah menjadi wacana publik, orang-orang, media, akan datang dan mempertanyakan integritas pemerintah kita. Konservasi di sini dan menambang di sebelah, jujur maksud saya, seberapa kredibelkah itu menjadi niat politik Anda?"⁵⁷

Fiksasi Protein

Proyeksi FAO dan OECD menunjukkan bahwa hasil tangkapan global dalam perikanan tangkap mengalami stagnansi – mencapai 90,9 juta ton pada tahun 2016⁵⁸ – dan tidak mungkin tumbuh dalam beberapa dekade mendatang. Sebagai perbandingan, produksi perikanan budidaya (sebagai pangan perikanan) diperkirakan mencapai 80 juta ton pada tahun yang sama, dan diproyeksikan meningkat hingga mencapai 2,1% per tahun pada skenario FAO tahun 2030.

Pada saat yang sama, sebuah "fitur umum dari wacana Pertumbuhan Biru [adalah] standar ganda perlakuan terhadap perikanan tangkap".⁵⁹ Contohnya, lima wilayah Uni Eropa yang dikutip untuk pertumbuhan biru adalah budidaya, wisata pesisir, bioteknologi kelautan, energi kelautan dan pertambangan dasar laut.⁶⁰ Demikian pula, seperti yang ditunjukkan pada contoh di tingkat nasional (lihat kotak 1-4), perikanan tangkap umumnya bukan pertimbangan penting dalam pengaturan ruang laut yang baru yang dipicu oleh agenda ekonomi biru. Gagasan Pertumbuhan Biru FAO, bagaimanapun juga, adalah salah satu dari beberapa skema

global yang berusaha untuk memasukan perikanan tangkap bersama dengan perikanan budidaya.

Selanjutnya, dampak ekologis yang sangat serius dari penangkapan ikan yang berlebihan, pengrusakan habitat dan pencemaran lautan yang membatasi penangkapan ikan yang tersedia meningkatkan marjinalisasi peran perikanan tangkap yang dimainkan dalam sebagian besar gagasan ekonomi biru. "Tren ini telah menghasilkan narasi kebijakan yang memosisikan perikanan tangkap sebagai 'telah berakhir', atau tunduk terhadap 'penurunan yang pasti terjadi'."⁶¹

Di sinilah muncul persoalan: meningkatnya permintaan dunia atas protein ikan⁶² dan menurunnya cadangan stok ikan tangkap liar di laut. Fiksasi protein untuk masalah ini tampaknya menjadi kerangka bagi budidaya ikan skala besar sebagai masa depan perikanan.

Sepanjang 30 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya meledak, melampaui pertumbuhan perikanan tangkap pada tingkat rata-rata 8,6% per tahun. Perikanan budidaya saat ini bertanggung jawab memenuhi hampir separuh dari seluruh ikan yang kita makan.⁶³ Memang benar bahwa sektor yang terus berkembang ini telah menyediakan protein yang stabil selama 3 dekade terakhir, namun produksi ini bergantung pada input energi dan peningkatan volume ikan tangkap, kedelai, rapeseed (rassica napus, tumbuhan penghasil minyak rapa -pen), biji bunga matahari dan gandum untuk pakan. Lebih jauh lagi, ini menciptakan serangkaian masalah sosial dan ekologis sepanjang jalan. Masalah yang melekat dalam fiksasi ini adalah ketergantungan terhadap peningkatan volume hasil tangkapan ikan liar untuk bisa menghasilkan peningkatan volume jenis spesies ikan budidaya. Hal ini khususnya pada kasus produksi spesies ikan mas, udang laut, salmon, ikan nila dan ikan bersirip lainnya.⁶⁴ Pada tahun 2016, hampir 15 juta ton tangkapan ikan, atau 13% dari tangkapan ikan global, digunakan

sebagai produksi pakan ikan,⁶⁵ dan produksi perikanan budidaya yang terus membesar (spesies yang bergantung pada tepung ikan dan minyak ikan sebagai pakan) pasti akan mengakibatkan lebih banyak tekanan dan persaingan untuk menangkap ikan liar di laut bebas.

Hal ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang siapa yang berhak atas ikan yang tersedia: komunitas masyarakat nelayan lokal yang bergantung pada tangkapan ikan untuk penghidupannya, pangan sehat dan nutrisi, atau perusahaan lintas negara (transnational corporations) yang memburu stok ikan pelagis di perairan asing untuk memberi makan industri budidaya ikan skala besar yang sedang tumbuh? Seperti yang digambarkan dalam *The Global Ocean Grab*, "budidaya adalah dinamika lain di mana kontrol atas sumber daya laut direbut oleh rezim korporasi pangan perikanan, dengan mengorbankan orang-orang yang tergantung pada sumber daya ini."⁶⁶ Sebagaimana paradigma pertumbuhan biru mendapatkan dukungan, komunitas nelayan skala kecil menjadi semakin terpinggirkan.



KOTAK 3

Transisi Turki menjadi perikanan budidaya

Pembelajaran dari pesatnya perkembangan industri perikanan budidaya di Turki mengungkapkan bahwa perusahaan perikanan skala besar merupakan sebagian yang selamat dari transisi, sementara tekanan untuk ketersediaan ikan terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ertör dan Ortega-Cerdá: "Tren ini mengubah praktik produksi hasil laut dari penangkapan menjadi budidaya sambil membuka peluang baru untuk modal, dengan jenis investasi baru."⁶⁷ Perubahan peraturan di Turki mendorong konsentrasi dalam sektor ini dengan menolak permohonan untuk investasi budidaya laut yang kurang dari 250 ton. Hal ini, seiring dengan modal dalam jumlah besar yang diperlukan untuk masuk ke sektor yang meningkat dengan cepat, mengakibatkan penghilangan langsung atau tidak langsung dari perikanan budidaya skala kecil oleh "perusahaan yang berkembang dan lahan budidaya yang berkembang".⁶⁸ Perikanan budidaya di Turki bergeser dari volume produksi 1.500 ikan per tambak di 4 kandang kayu kubik meter pada era 1990-an menjadi satu juta ikan per tambak yang ditempatkan di kandang melingkar berdiameter 50 meter.⁶⁹ Singkatnya, pertumbuhan cepat dalam budidaya sudah menekan produksi perikanan skala kecil keluar dari pasar.

Hubungan antara perikanan tangkap dan budidaya seringkali dibingkai seolah-olah perikanan budidaya akan membebaskan lautan dari tekanan ekologis yang disebabkan oleh penangkapan ikan berlebihan. Namun faktanya, ketergantungan pada ikan teri untuk tepung ikan dalam perikanan budidaya di Turki telah menambah tekanan pada kebutuhan ikan teri di Laut Hitam. Seorang pengusaha ikan dalam industri dan produsen tepung ikan di Turki menyatakan, "ini menciptakan ekonomi perikanan tangkapnya sendiri dan meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan ikan liar di laut ketimbang menurunkannya. Sehingga, ini menimbulkan paradoks antara penangkapan ikan dan produksi perikanan laut intensif."⁷⁰ Lonjakan global dalam budidaya ikan yang dirayakan dalam kebijakan pertumbuhan biru menimbulkan banyak pertanyaan tentang dampak sosial dan ekologi yang membutuhkan jaminan penelitian lebih lanjut. Tetapi yang jelas adalah bahwa "alih-alih memberikan solusi untuk mengurangi cadangan ikan, budidaya ikan yang intensif dari spesies karnivora hanya memecahkan krisis modal dalam jangka pendek, dan perluasannya akhirnya memberi tekanan lebih besar pada perikanan tangkap".⁷¹

Fiksasi Energi/Ekstraktif

Dibingkai sebagai tanggapan atas kekhawatiran terhadap dampak perubahan iklim, wacana ekonomi biru di tingkat global memiliki fokus yang kuat pada industri yang sedang berkembang yaitu: energi alternatif dari angin dan arus pasang surut serta ekstraksi laut dalam untuk mineral yang langka.⁷² Bersamaan dengan itu, sistem industri minyak dan gas adalah sistem yang telah meluas dan berkembang, serta merupakan salah satu dari kekuatan terbesar dalam ekonomi kelautan (dan global). Seperti angka yang digambarkan dalam ilustrasi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) berikut, minyak dan gas dari lepas pantai menyumbang hampir 34% dari total nilai industri berbasis kelautan pada tahun 2010, setara dengan

USD 510 miliar. Sebagai perbandingan, industri perikanan tangkap, menurut OECD, menyumbang sebesar USD 15 miliar.⁷³

Meskipun angkanya bervariasi dari satu laporan atau lembaga dengan lainnya, intinya adalah bahwa industri perikanan menyumbang proporsi yang hampir tidak signifikan dari perekonomian laut global jika dibandingkan dengan minyak dan gas, dan perbedaan ini diproyeksikan akan meningkat. Sementara itu, nilai perikanan skala kecil tidak diperhitungkan, begitu pula nelayan yang dianggap sebagai pelaku sosial yang penting terlepas dari fakta bahwa penghidupan dan hak asasi manusianya tergantung pada akses mereka terhadap sumber daya kelautan.

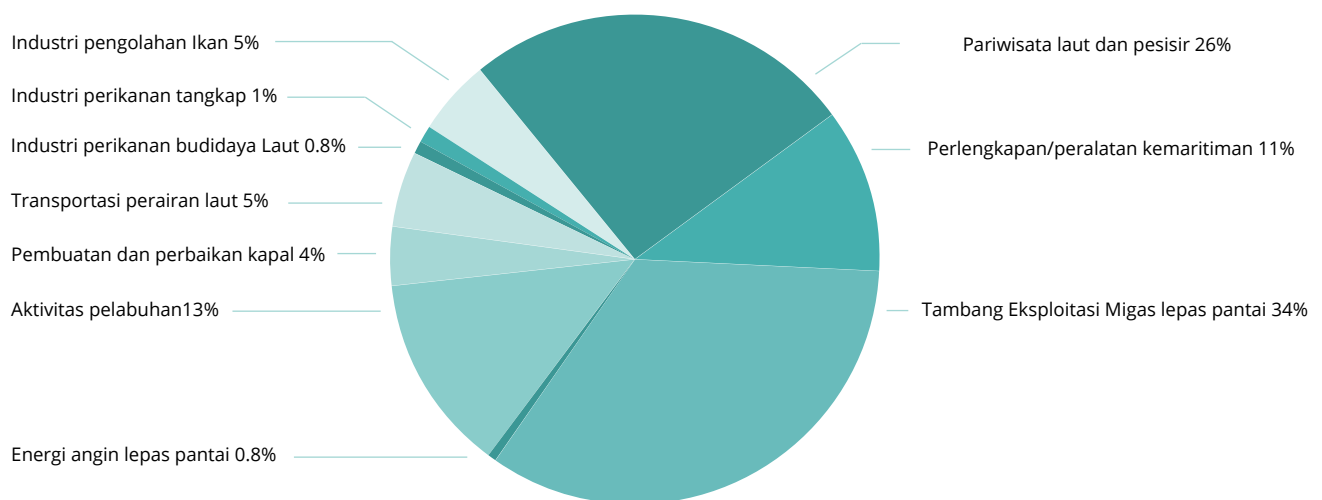
Dampak ekologi dari ekstraksi minyak dan gas di laut (khususnya sejak tumpahan minyak Deepwater Horizon pada tahun 2010), dan efek yang lebih luas dari bahan bakar fosil dan emisi karbon terhadap perubahan iklim saat ini tidak dapat disangkal. Berdasarkan OECD, "laut itu cair dan saling berhubungan satu sama lain. Implikasinya: apa yang terjadi di satu tempat dapat berefek pada yang terjadi di tempat lainnya, karena pencemar dan spesies asing dibawa oleh arus dan/atau kapal laut ke jarak yang jauh lebih besar daripada yang terjadi di darat."⁷⁴

Menurut Watts, jaringan yang luas dari sumur minyak, saluran pipa migas, kapal tanker minyak dan sebagainya yang membentuk 'infrastruktur-petro global yang bertanggungjawab terhadap hampir 40% emisi CO₂ di tingkat global.⁷⁵ Pada New Policy Scenario (Skenario Kebijakan Baru),⁷⁶ Badan Energi Internasional (The International Energy Agency/IEA) memperkirakan bahwa "permintaan gas alam [akan] naik hampir 50% [dari 2016] hingga 2040 dan konsumsi minyak [akan] terus tumbuh." Bidang pertumbuhan terbesar baik produksi minyak dan gas diproyeksikan berasal dari eksplorasi laut dalam, dengan produksi gas lepas pantai khususnya meroket dengan sebesar 69% (2,2% per tahun) dari 2016 hingga 2040.⁷⁷ Dengan kata lain, "Bentuk perintah ini mendorong batas minyak ke ujung bumi, atau lebih tepatnya berpacu kencang ke dasar lautan. Eksplorasi perairan laut dalam adalah mantra baru."⁷⁸

Masalahnya: bagaimana memajukan agenda keberlanjutan yang seharusnya dari pertumbuhan biru tanpa berhadapan langsung dengan sektor minyak dan gas bumi?

Ketegangan pokok ini menyoroti pentingnya memahami hubungan antara industri minyak dan gas bumi dengan ruang kebijakan pertumbuhan biru (di berbagai skala). Masalah spesifik kontekstual dan empiris yang rumit ini memerlukan penyelidikan yang lebih dalam daripada yang memungkinkan dalam laporan singkat ini. Namun, eksplorasi awal terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut (lihat kotak 4 dan 5) mengungkapkan bahwa kebijakan pertumbuhan biru di level nasional tidak berani untuk membatasi pembangunan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memanfaatkan keuntungan dari infrastruktur dan keahlian yang telah ada dalam hal minyak dan gas di bawah tameng transfer kapasitas untuk sektor lainnya. **Dengan kata lain, fiksasi energi: kebijakan pertumbuhan biru mengalokasikan ruang laut untuk memperluas pengeboran lepas pantai, dan memberikan peluang bagi pemanfaatan baru atas infrastruktur laut yang telah ada.** Fokus publik yang minimal atau keterlibatan dengan industri minyak dan gas merendahkan keutamaan sektor ini ke dalam tata kelola laut, sehingga terlindungi dari pengawasan yang tidak diinginkan. Pertanyaan pentingnya tetaplah mengenai peran dari 'pembiayaan biru' dalam perluasan industri ekstraktif di laut (minyak, gas dan mineral yang langka di laut dalam).

Nilai Tambah Industri Berbasis Laut pada Tahun 2010 Berdasarkan Jenis-Jenis Industri



Catatan: perikanan tradisional tidak termasuk dalam ikhtisar ini.
Sumber: Angka pada gambar 1.2 dan data di OECD (2016)

StatLink: <http://dx.doi.org/10.1787/888933334614>

Pertambangan laut dalam: memperkuat pertumbuhan biru atau mendatangkan bencana ekologis dengan tiada pengetahuan tentang konsekuensinya.

Kepentingan dalam pertambangan dasar laut, khususnya yang menargetkan elemen bumi yang langka, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, menurut OECD, telah didorong secara ekonomi oleh “peningkatan permintaan dan kenaikan harga” khususnya berasal dari ‘teknologi energi hijau’ (misalnya turbin angin dan panel surya/photovoltaic batteries yang bergantung pada mineral logam ini) dan secara politis oleh kepentingan Uni Eropa dan yang lainnya untuk tidak dikaitkan dengan negara sumber seperti China dan Republik Demokratik Kongo. Pertambangan dasar laut dilihat sebagai solusi untuk kedua permasalahan tersebut.⁹⁰ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pertambangan Nautilus, “dasar laut mengandung beberapa akumulasi terbesar yang dikenal dari logam yang

sangat mendasar untuk ekonomi hijau, dalam konsentrasi yang umumnya jauh lebih tinggi daripada di daratan, sehingga dapat dipastikan, kita akan menemukan lagi akhirnya sumber daya yang penting dari dasar laut.”⁹¹ Dan pada awal tahun 2019, Sekretaris Jenderal dari Otoritas Dasar Laut Internasional (International Seabed Authority/ISA) menyatakan bahwa “kita saat ini berada di tahap di mana kita dapat melihat bahwa mineral laut dalam bisa menjamin ketersediaan pasokan mineral yang stabil dan aman [...] memiliki potensi yang dapat menyediakan pasokan mineral yang dibutuhkan dengan biaya rendah, ramah lingkungan, menyediakan mineral yang dibutuhkan untuk menuju ekonomi pintar, mereka juga dapat berkontribusi pada ekonomi biru bagi beberapa Negara-negara berkembang.”⁹²

KOTAK 4

Belanda: energi angin, wajah publik pengeboran lepas pantai yang sedang berjalan

Pemerintah Belanda, pendukung umum dari Prakarsa Pertumbuhan Biru FAO (Blue Growth Initiative), telah mengembangkan Dokumen Kebijakannya sendiri di Laut Utara, tahun 2016-2021 bahwa “kaitan dengan strategi ‘Pertumbuhan Biru’, berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan di laut, maritim dan ekonomi pesisir, sebagaimana dirumuskan oleh Komisi Eropa”.⁷⁹ Dengan menggunakan uji coba perencanaan tata ruang maritim, dokumen kebijakan ini berusaha untuk mencari kejelasan bagaimana izin untuk pemanfaatan ruang laut akan dapat diberikan. Untuk menjelaskan prioritas ini, skenario saat ini dan masa mendatang dijelaskan untuk masing-masing bidang kegiatan dalam ekonomi biru. Banyak penekanan diberikan pada “transisi energi di laut” Belanda⁸⁰ dan sektor energi angin yang muncul sebagai bukti atas nilai yang dijanjikan akan keberlanjutan.

Infrastruktur minyak dan gas yang telah ada diidentifikasi sebagai ruang yang memungkinkan bagi investasi, baik untuk pemeliharaan maupun renovasi untuk mengakomodasi energi angin. Kedua industri energi dapat didukung melalui pembagian helipad dan infrastruktur lainnya. Kasus ini menyoroti beberapa pertanyaan tentang sejauh mana perusahaan minyak dan gas (di Belanda dan di tempat lain) melihat masuk ke dalam pengembangan energi alternatif di laut sebagai pembendung terhadap kemerosotan harga, atau sebagai cara untuk terus mengendalikan dan berinvestasi di infrastruktur laut yang juga melayani pengeboran lepas pantai.

Dikatakan, dalam fine print (bagian dari kontrak yang mengandung pemesanan dan kualifikasi yang sering dicetak dalam huruf yang lebih kecil –pen) menunjukkan dengan sangat jelas bahwa perpindahan ke energi alternatif tidak akan membatasi atau mengganggu perluasan ekstraksi minyak dan gas. Dokumen ini kemudian mengakui bahwa persaingan antar kepentingan dapat muncul, dan memberikan panduan bagi pegawai negeri yang harus menilai siapa yang harus diberikan izin. Ini menyatakan bahwa “Kabinet mengutamakan kegiatan kepentingan nasional: pengiriman, ekstraksi minyak dan gas, penyimpanan CO₂, pembangkit energi berkelanjutan (angin), ekstraksi pasir dan pengisian kembali, serta pertahanan”.⁸¹ Dalam rencana tata ruang, semua sektor lainnya dialokasikan pada daerah yang ditentukan, sedangkan nelayan ditempatkan ke

daerah yang tidak terdefinisi bukan yang “tertutup untuk energi dan alam.”⁸² Bahkan, laporan ini sangat jelas menyatakan: “Karena bangkitnya energi angin, produksi energi di laut akan mengambil lebih banyak ruang. Dalam beberapa kasus, kapal pelayaran komersial dan rekreasi perlu mengubah jalannya, dan wilayah tangkap nelayan akan menyusut”⁸³ (penekanan ditambahkan).

Rencana tata ruang menawarkan yang menyerupai alat bedah untuk mengiris, membagikan atau bahkan merampas akses ke sumber daya laut dari pengguna sebelumnya. Di bawah panji-panji “transisi energi di laut” terhadap energi angin, usulan itu sebenarnya sama sekali bukan transisi teritorial dari satu rezim energi ke rezim energi lainnya. Bersamaan dengan energi angin, ruang yang dialokasikan untuk minyak dan gas diproyeksikan akan diperluas, dan karenanya ruang wilayah tangkap ikan (baik skala kecil maupun industri) akan menyusut. Ketika dorongan datang untuk mendesak, pemerintah Belanda menegaskan bahwa prioritas akan diberikan kepada minyak dan gas.

KOTAK 5

Norwegia: mengeksport jejak karbon dan memasarkan keahlian industri minyak ke negara lain

Meskipun hanya sekitar 2% dari minyak mentah global yang berasal dari landas kontinen Norwegia, negara ini adalah produsen gas alam terbesar ketiga di dunia, memasok sekitar 25% dari total konsumsi Uni Eropa.⁸⁴ Pemerintah Norwegia telah menyediakan dana untuk Inisiatif Pertumbuhan Biru FAO melalui agen pengembangannya, NORAD, dan telah memasukkan wacana pertumbuhan biru ke dalam dokumen kebijakan laut nasionalnya. Namun, kekuatan minyak bumi utara yang sudah lama ini memegang peranan minyak dalam strategi samudra masa depan. Karena Strategi Kelautan Pemerintah Norwegia Tahun 2017 menjelaskan: “Teknologi perminyakan berada di pusat pengembangan perikanan budidaya berbasis laut dan energi terbarukan berbasis laut.”⁸⁵ Alih-alih beralih dari minyak bumi, Norwegia pada dasarnya menggandakan komitmen minyak dan gas sambil memposisikan diri sebagai pusat pengetahuan maritim global yang ditetapkan untuk menyediakan “teknologi dan kompetensi dari industri perminyakan ke wilayah lain”.⁸⁶

Posisi global ini sejalan dengan pendekatan umum Norwegia untuk mendorong bahan bakar fosil ke luar negeri - hampir semua minyak dan gas Norwegia diekspor, mewakili lebih dari sepertiga nilai total ekspor - sambil membersihkan penggunaan energinya di negaranya sendiri.⁸⁷ Perusahaan nasional Statoil telah secara aktif mengarahkan muatan untuk mengebor di Kutub Utara karena es yang mencair, dan mulai bekerja pada lima sumur eksplorasi baru di Laut Barents pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, Direktorat Petroleum Norwegia menegaskan bahwa produksi minyak telah meningkat selama tiga tahun dalam secara linier dan bahwa landas kontinen Norwegia sedang menyedot gas pada tingkat paling tinggi. Angka-angka ini diharapkan akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang.⁸⁸ Dan seperti yang dijelaskan oleh kerangka Strategi Kelautan Norwegia, “sektor minyak dan gas akan tetap menjadi pasar inti yang paling penting bagi sebagian besar bisnis pasokan”.⁸⁹ Kasus-kasus dari Belanda, Norwegia dan Afrika Selatan menggambarkan bahwa kerangka pertumbuhan biru gagal mengekang ekstraksi bahan bakar fosil. Sementara wacana pertumbuhan biru di tingkat global (seperti misalnya diartikulasikan di Rio+20 dan dalam Pertumbuhan Biru FAO) berusaha untuk menyoroti keutamaan kelestarian lingkungan, menjadi jelas bahwa strategi pertumbuhan biru tingkat nasional telah gagal untuk mengatasi masalah yang terpenting yaitu masalah pembakaran bahan bakar fosil, dan bahwa dalam prakteknya fokusnya adalah untuk mengakomodasi perluasan terus menerus industri minyak dan gas.



Banyak lokasi yang saat ini menjadi target untuk ekstraksi unsur bumi yang langka berada di dalam perairan internasional. Sebagaimana ditetapkan dalam UNCLOS, area laut di luar dari 200 mil laut dari pantai (Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE) diklasifikasikan sebagai kepemilikan bersama untuk kemanusiaan dan secara sederhana hanya disebut sebagai "Area". Area ini mewakili hampir setengah dari permukaan laut dan diatur oleh ISA. ISA terdiri dari 168 perwakilan dari negara-negara anggota yang masing-masing menunjuk 36 orang untuk menjadi Komisi Hukum dan Teknis (Legal and Technical Commission/LTC) yang pada gilirannya dibebankan untuk mengelola permintaan atas akses dan perizinan untuk pertambangan. LTC umumnya bersidang dan membuat keputusan di balik pintu tertutup dan tidak mengungkapkan apa yang telah ditemukan di bawah laut oleh perusahaan-perusahaan – bahkan kepada perwakilan negara anggota ISA. Menurut kata-kata seorang pengamat lingkungan di ISA, "Anda punya [30] orang yang membuat keputusan tentang setengah planet ini di balik pintu yang tertutup rapat."⁹³ Sebagaimana Kristina Gjerde, Senior High Seas Adviser di Uni Internasional untuk Konservasi Alam (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources/IUCN*), mengatakan kepada Dewan Negara Ang-

gota ISA: "Ada risiko besar bahwa kita tidak akan tahu apa yang telah hilang sampai telah benar-benar hilang."⁹⁴ Ketika ISA bergerak menuju fase berikutnya dalam memberikan kontrak untuk eksploitasi, "ketegangan antara mandat ISA yang ganda –dan saling bertentangan– untuk mendorong eksploitasi dasar laut yang kurang dikenal yang mencakup sekitar setengah planet sambil memastikan perlindungannya" menjadi lebih dan lebih jelas.⁹⁵

Selain dari iklim yang ramah pertambangan ini, rancangan peraturan ISA telah menyebutkan prioritas terhadap lingkungan tapi kurang menggambarkan secara rinci bagaimana ini akan dipastikan.⁹⁶ Berdasarkan laporan OECD, "bahkan pertambangan laut dalam yang paling hati-hati dan teliti akan mengganggu ekosistem laut. Pandangan yang umumnya dipegang adalah pertambangan skala industri akan menimbulkan berbagai ancaman yang akan mengubah lautan dalam secara permanen, tapi belum ada gambaran yang jelas mengenai dampak apa yang mungkin terjadi."⁹⁷ Sementara itu, gagasan ekonomi biru yang spesifik menarik pembiayaan dan membuka pintu bagi sektor kontraktor swasta untuk mendapatkan akses ke ruang laut yang diatur oleh ISA.

KOTAK 6

Negara-negara berkembang di Pulau-Pulau Kecil: penyokong pertambangan laut dalam

Meskipun Negara-Negara Berkembang di Pulau-Pulau Kecil (Small Island Developing States/SIDS) ditetapkan sebagai yang paling terdampak oleh perubahan iklim, namun negara-negara ini juga menjadi model contoh dari ekspansi ekonomi biru ke dalam upaya pertambangan laut dalam. Pada tahun 2011, Robert G. Aisi, Perwakilan Tetap Papua New Guinea kepada PBB yang berbicara atas nama SIDS Pasifik⁹⁸ yang diwakili di komite persiapan untuk Rio+20, menyatakan, "Selain itu, masalah yang kami prediksi akan muncul sebagai topik pada periode paska Rio+20 dalam kaitannya dengan Ekonomi Biru adalah pertambangan dasar laut dalam. Meskipun pertambangan dasar laut dalam dan kegiatan terkait mungkin merupakan perjuangan yang cukup baru untuk beberapa negara, kami melihat perkembangan di bidang ini sebagai salah satu yang akan melibatkan Samudera Pasifik dan SIDS di wilayah Pasifik."⁹⁹ Enam tahun kemudian pada bulan Juni 2017, Konferensi Kelautan PBB (UN Ocean Conference) di New York menandai peluncuran "UN-DESA [Departemen Bidang Ekonomi dan Sosial/Department of Economic and Social Affairs] dan komitmen kemitraan sukarela ISA pada Prakarsa Abyssal untuk Pertumbuhan Biru (Abyssal initiative for Blue Growth)." Kemitraan ini terikat dengan sebuah "pencarian untuk Ekonomi Biru melalui promosi keuntungan sosio-ekonomi bagi negara-negara berkembang, termasuk SIDS" serta peningkatan pengetahuan ilmiah dan kapasitas penelitian serta mendorong konsep ekonomi biru sebagai sarana untuk memungkinkan agar SIDS untuk "mendapatkan manfaat sepenuhnya dari pembangunan berkelanjutan atas sumber daya mineral laut dalam mereka."¹⁰⁰

Salah satu cara kunci keterlibatan SIDS dalam eksplorasi pertambangan laut dalam adalah dengan mensponsori kontraktor yang mencari izin-izin. Menurut kebijakan ISA, saat perusahaan swasta menginginkan kontrak eksplorasi di suatu Area, mereka harus disponsori oleh negara anggota ISA dan memiliki anak perusahaan di negara bagian negara tersebut. Secara praktis, pendekatan sponsorship memberi peluang bagi perusahaan pertambangan untuk mendapatkan kontrak melalui SIDS.

Hingga Agustus 2018, sejumlah 29 kontrak untuk eksplorasi telah diberikan oleh ISA.¹⁰¹ ISA sedang dalam proses meninjau kembali 'kodifikasi aturan pertambangan', yang kemudian akan mengatur alokasi dan pengelolaan kontrak eksploitasi. Sampai saat ini, tidak ada yang diberikan. Dari 29 kontrak, sebagian besar disponsori oleh negara-negara besar dengan perekonomian kuat seperti Cina, Korea, Jepang, India, Rusia, Brasil, Inggris, Jerman dan Perancis, dan mereka seringkali menyediakan akses ke badan penelitian publik mereka sendiri atau perusahaan pertambangan milik negara. Namun, mulai tahun 2011, SIDS juga mulai mensponsori perusahaan tambang swasta.

Sebagai contoh, pada tahun 2012, bangsa Tonga mensponsori Tonga Offshore Mining Ltd. (TOML) untuk eksplorasi mineral nodul polimetalik di zona patahan bawah laut Clarion Clipperton di Samudera Pasifik bagian utara. "TOML telah menyetujui royalti dengan pemerintah Tonga sebagai bagian dari perjanjian sponsornya sebesar US\$ 1,25 per ton kering untuk 3 juta ton nodul kering yang ditambang per tahun, dan US\$ 0,75 per ton kering untuk semua ton berikutnya yang ditambang setelahnya dalam tahun yang sama."¹⁰² TOML 100% dimiliki oleh Nautilus Minerals yang berkantor pusat di Kanada. Pemegang saham terbesar (yaitu 30,4%) adalah MB Holding Company LLC., perusahaan jasa pengeboran minyak dan gas multinasional yang berkantor di Kesultanan Oman.

Bukan hanya SIDS yang memberikan sponsor untuk kepentingan transnasional. UK Seabed Resources memiliki dua kontrak untuk eksplorasi, yang disponsori oleh Kerajaan Inggris. Namun, UK Seabed Resources adalah anak perusahaan Lockheed Martin, sebuah perusahaan pertahanan dan keamanan yang berbasis di Amerika Serikat. Oleh karena AS bukan penandatanganan UNCLOS, sehingga tidak memiliki perwakilan di dewan ISA dan oleh karena itu tidak bisa mensponsori kontraktornya sendiri.

Kerajaan Inggris, Irlandia Utara dan Tonga secara aktif menyediakan gerbang masuk ke laut dalam untuk perusahaan tambang multinasional. Dan proposal oleh UN-DESA dan ISA –seperti Prakarsa Abyssal untuk Pertumbuhan Biru- mengklarifikasi bahwa ini adalah visi bagi SIDS dalam ekonomi biru. Sebagaimana dijelaskan dalam makalah konsep untuk Konferensi Kelautan PBB 2018, Nauru, Kiribati, Tonga dan Kepulauan Cook telah memberikan sponsor untuk kontrak eksplorasi baru di Area. Makalah ini kemudian merekomendasikan kerjasama erat antara kontraktor swasta, ISA dan negara-negara anggota “dalam membantu negara-negara yang tertarik, dan khususnya SIDS, untuk menyusun kerangka kerja pertambangan dasar laut dalam mereka.”¹⁰³

Penetapan modal dan investasi di sektor energi dan ekstraktif

Sulit untuk menekan jika melihat betapa besar peran yang dimainkan oleh sektor minyak dan gas bumi dalam ekonomi global. Nilai total dari pasar minyak dan gas bumi mencapai US\$ 3 triliun, dan ‘kelima perusahaan minyak terbesar’ menghasilkan pendapatan yang melebihi Produk Domestik Bruto (PDB atau Gross Domestic Product/GDP) seluruh Afrika.¹⁰⁴ Tetapi di luar arus kas yang terkait dengan barang-barang yang diperdagangkan, penting untuk menyoroti rancang bangun dari perlengkapan mesin, teknologi, infrastruktur, jaringan transportasi dan aset lainnya yang didukung oleh modal yang telah ditanamkan dalam industri ini. Menurut Watts, ini mewakili nilai yang setara dengan USD 40 triliun. Ia menggambarkannya dengan gambar berikut:

Hampir 5 juta sumur minyak menghasilkan lobang di permukaan bumi (sebanyak 77.000 hasil pengeboran [pada tahun 2011], 4.000 di lepas pantai; 3.300 subsea (peralatan, teknologi dan metode untuk mengeksplorasi, mengebor, pengembangan dan operasi lapangan migas yang ada di bawah permukaan air –pen), menusuk kerak bumi di landas kontinen dalam beberapa kasus ribuan meter di bawah permukaan laut. Beberapa perkiraan lebih dari 40.000 lapangan migas beroperasi. Lebih dari 2 juta kilometer saluran pipa menyelimuti dunia dalam jaringan besar (180.000 kilometer lagi akan dibangun dengan biaya modal lebih dari US\$ 265 miliar selama empat tahun berikutnya); tambahan 75.000 kilometer lagi dari jalur transportasi minyak dan gas di sepanjang dasar laut. Terdapat 6.000

platform tetap, dan 635 instalasi pengeboran lepas pantai (total instalasi tambang lepas pantai internasional di bulan Juni 2011 adalah lebih dari 1.158 menurut Baker Hughes). Lebih dari empat ribu tanker minyak memindahkan 2,42 miliar ton minyak dan produk turunan minyak setiap tahunnya –sepertiga dari perdagangan laut global; lebih dari delapan puluh kapal produksi dan penyimpanan telah berjalan selama lima tahun terakhir.¹⁰⁵

Lingkungan yang dibangun sangat besar ini, apa yang disebut oleh Carton sebagai “lanskap bahan bakar fosil”,¹⁰⁶ yang menciptakan sejenis kelemahannya sendiri atau ‘jalur ketergantungan’.¹⁰⁷ Ini karena sejumlah besar modal uang yang ‘ditetapkan’ di dalamnya biasanya memiliki periode perputaran yang panjang, sehingga lanskap “menggunakan kekuatan paksaan melampaui manfaat untuk masa depan.”¹⁰⁸ Artinya, pemodal yang telah membuat investasi ke dalam ekstraksi bahan bakar fosil tidak sesederhana hanya untuk kepentingan mengantisipasi keuntungan dari investasinya. Memang, perjanjian seperti Energy Charter Treaty secara aktif melindungi investasi semacam itu –dan bahkan investasi yang direncanakan- dari semua jenis keputusan politik yang mungkin mempengaruhi keuntungan yang diharapkan.¹⁰⁹ Dengan cara ini, investasi ke dalam lingkungan yang dibangun melarang perubahan politik, karena mereka mengunci logika yang berbeda ke dalam bentang investasi. Ekspansi adalah kunci untuk memastikan imbal balik dari investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem ekstraksi lepas pantai yang mahal.

Di tengah tingkat investasi semacam ini, pasar minyak mencapai kemerosotan harga pada tahun 2014. Selain itu, meningkatnya kecaman publik terhadap dampak perubahan iklim mengakibatkan keributan yang menyiratkan bahwa telah tiba waktunya bagi kita untuk mengakhiri kecanduan kita terhadap bahan bakar minyak. Paska-2014 terlihat sebagai titik untuk kembali pada ekstraksi serpihan berbasis tanah yang lebih murah, menebar kekhawatiran atas semua uang yang telah banyak dihabiskan ke dalam infrastruktur (minyak dan gas -pen) lepas pantai dan biaya ekstraksi migas yang relatif lebih tinggi di lautan. Seiring dengan pulihnya pasar migas yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang, pertumbuhan biru memberikan kerangka kebijakan yang elegan untuk menjaga investasi tetap mengalir ke dalam infrastruktur laut untuk berbagai pemanfaatan (multi-guna -pen) sambil memastikan alokasi baru ruang laut untuk perluasan pengeboran lepas pantai.

Satu proposal yang muncul dari lingkaran kebijakan pertumbuhan biru yang dapat menutupi biaya signifikan bagi perusahaan minyak dan pembayar pajak adalah platform multi-guna. Cadangan minyak dan gas, khususnya di Eropa, tersimpan lama dan tunduk pada ketentuan di dalam Konvensi untuk Perlindungan Lingkungan Laut di Atlantik Utara-Timur (Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic atau Konvensi OSPAR) yang memaksa perusahaan minyak untuk sepenuhnya menonaktifkan infrastruktur yang tidak aktif.¹¹⁰ Antara tahun 2017 dan 2025, sekitar 200 platform harus dihilangkan, 2.500 sumur ditutup dan 78.000 kilometer pipa dinonaktifkan di Laut Utara.¹¹¹ Ini adalah kewajiban yang sangat rumit dan mahal. Untuk Inggris, pemerintahnya memperkirakan bahwa biaya bisa mencapai 39 miliar poundsterling, sementara sebuah organisasi penelitian independen, Intergenerational Foundation menghitung lebih banyak yaitu sekitar 80 miliar poundsterling.¹¹² Sekitar 10% dari instalasi pengeboran di Teluk Meksiko telah ditinggalkan sebagai bagian dari program nasional instalasi pengeboran ke terumbu karang.¹¹³ Ketimbang terumbu karang, proposal saat ini untuk Laut Utara melibatkan eksplorasi pilihan untuk mengubah plat-

form minyak kuno menjadi fasilitas perikanan budidaya atau ladang energi angin (serangkaian turbin angin yang berada di satu lokasi untuk memproduksi energi dari energi angin -pen).¹¹⁴ Tantangan utamanya adalah bagaimana menyiasati peraturan Konvensi OSPAR, yang mengamankan penonaktifan di negara-negara penandatanganan.¹¹⁵ Jika hambatan regulasi seperti itu dapat ditangani, rekomendasi kebijakan pertumbuhan biru seperti transisi dan pengembangan platform pengeboran lepas pantai multi-guna¹¹⁶ mewakili berbagai cara di mana modal dapat dibebaskan untuk investasi baru di proyek-proyek lepas pantai atau jenis proyek lainnya yang juga diprioritaskan dalam upaya perencanaan tata ruang laut.

Di perairan laut dalam, masih dilihat seberapa besar peluang ekonomi mineral bumi yang langka yang mewakili industri ekstraksi laut. Meskipun teknologi telah berkembang pesat, eksplorasi membutuhkan banyak investasi di awal: membiayai kapal penelitian dan kendaraan yang dioperasikan dari jauh jauh untuk mampu mencapai lubang dasar laut dalam sekitar USD 75.000 per hari.¹¹⁷ Sampai saat peraturan eksploitasi ISA jelas, investasi sangat sulit. Kris Van Nijen, General Manager dari Sea Mineral Resource mengatakan: "Kami berbicara mengenai lebih dari ratusan juta dolar. Jika kita tidak tahu bagaimana kita akan diatur di masa depan, maka kita tidak dapat menginvestasikan uang sebanyak itu."¹¹⁸

Fiksasi biru sama sekali tidak lengkap. Dapatkah ekonomi biru benar-benar menghidupkan pembiayaan yang dibutuhkan untuk investasi berkelanjutan dalam infrastruktur laut? Dan jika tidak, dari mana asalnya? Mungkin yang lebih penting, akankah momentum di balik kebijakan pertumbuhan biru memberikan dorongan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan regulasi terhadap akumulasi modal (seperti kewajiban OSPAR atau kode pertambangan ISA)? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong untuk adanya penelitian lebih lanjut dan posisi sosial dan politik sebagaimana agenda pertumbuhan biru yang telah diluncurkan di tingkat nasional.

Kesimpulan

Pertumbuhan biru adalah konsep yang luas dan tak pasti, rumah bagi banyak pandangan dan ideologi. Ketidakpastian ini telah membantu untuk menarik beragam koalisi dari aktor, yang masing-masing mampu memproyeksikan interpretasi mereka sendiri ke dalam agenda kebijakan ini. Untuk beberapa hal, ini tentang konservasi dan energi terbarukan, sedangkan dalam praktiknya pengeboran lepas pantai tetap tak tersentuh. Membungkus pertumbuhan biru dalam kerangka keberlanjutan membantu untuk mengatasi kekhawatiran yang berkembang mengenai perubahan iklim, dan disalurkan melalui pariwisata berkelanjutan dan Kawasan Konservasi Laut skala besar yang menjadikannya menguntungkan. Ini adalah fiksasi konservasi.

Untuk hal lainnya, ini mengenai suatu transisi ke perikanan budidaya yang menggantungkan ruang laut untuk pemanfaatan lainnya dan menghindari permasalahan menurunnya ketersediaan ikan dan kebutuhan untuk peningkatan jumlah pakan berdasarkan ikan tangkapan dan bahan lainnya termasuk kedelai, bunga matahari, gandum dan rapeseed (*rassica napus*, tumbuhan penghasil minyak rapa -pen). Ini adalah fiksasi protein.

Pada akhirnya, rencana tata ruang laut pada tingkat nasional secara nyata memprioritaskan sektor yang menghasilkan keuntungan terbesar: khususnya migas dan pelayaran serta pertambangan. Pendekatan ini juga menawarkan lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari infrastruktur dan keahlian yang telah ada dalam pengembangan energi alternatif dan perikanan budidaya. Ini adalah fiksasi energi/ekstraktif.

Sekaligus sebagai agenda pertumbuhan biru, masih ada kontradiksi sosial dan ekologis yang tidak dapat diperbaiki. Dan konflik sosial dan lingkungan yang hanya akan semakin dipicu selama kontradiksi ini masih ada. Seperti halnya kasus-kasus historis sebelumnya mengenai pembatasan dan pergeseran dalam rezim pengaturan, kepala negara tampaknya terutama melihat pertumbuhan biru sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik antara industri laut yang saling bersaing. Dan hal ini terjadi dalam konteks perintah yang memaksakan untuk dapat memastikan tingkat pertumbuhan majemuk dengan berbagai cara yang dibutuhkan.¹¹⁹

Pertumbuhan biru dengan demikian bermanifestasi sebagai tindakan penyeimbang untuk meringkai upaya ini sebagai 'berkelanjutan' dan berada dalam kepentingan setiap orang.

Namun, penting untuk menyoroti bahwa jutaan orang yang hingga hari ini masih bergantung pada ruang laut untuk kehidupan dan sumber pencahariannya –khususnya nelayan skala kecil- sebagian besar tidak diundang di dalam pesta biru ini. Ini menimbulkan pertanyaan politis yang sangat rumit bagi gerakan nelayan dan jaringan aliansinya. Beberapa mencoba untuk mengatur undangan ke dalam ekonomi biru, mempercayai bahwa ini adalah cara yang paling pasti untuk mengamankan hak atas wilayah tangkapnya. Namun lainnya yang lebih skeptis, telah menyaksikan bagaimana agenda pertumbuhan biru memojokkan para nelayan skala kecil ke sudut yang mustahil.

Bersamaan dengan meluasnya perkembangan industri kelautan tidak mudah bagi nelayan: ruang yang mereka andalkan untuk kehidupan dan mata pencaharian mereka dengan cepat dikonstruksikan ke dalam rencana untuk pelabuhan baru, fasilitas wisata, jalur pelayaran, area konservasi dan penambangan baru, dan wilayah budidaya perikanan yang baru. Dan jika mereka berhasil mempertahankan area penangkapan ikan tertentu, dampak kolektif dari konstruksi, pencemaran dan perubahan iklim berarti semakin kecil kemungkinannya ikan akan berlimpah di sana. Untuk bertahan hidup, mereka harus pergi lebih jauh dan lebih jauh ke laut, meningkatkan biaya bahan bakar mereka serta paparan mereka terhadap bahaya lautan dan kemungkinan konflik dengan armada perikanan industri. Bagi banyak orang, menangkap ikan tidak lagi dapat dipertahankan.

Dalam menghadapi menipisnya cadangan ketersediaan ikan yang semakin menurun, kebutuhan pendekatan yang sensitif secara ekologi dan sosial terhadap perikanan semakin meningkat. Ini lebih jelas bagi nelayan skala kecil daripada yang lain, tetapi syarat masuk ke dalam pihak pertumbuhan biru membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup dan menjunjung standar tersebut. Di sinilah letaknya rahasia buruk di jantung agenda pertumbuhan biru: nafsu serakah terhadap minyak, gas, mineral, protein dan konservasi yang memicu dan membentuk agenda pada dasarnya tidak berkelanjutan. Kesepakatan tiga bagian dengan fiksasi konservasi, protein dan energi/ekstraktif yang telah dirangkai bersama gagal untuk mengatasi penyebab mendasar dari degradasi lingkungan - termasuk perubahan iklim - dan mengutuk populasi nelayan skala kecil ke masa depan yang semakin putus asa dalam perebutan ruang yang semakin menyusut dan ikan yang semakin sedikit.

Endnotes

- 1 Tema lainnya yang penting adalah aktivitas pengiriman, bioteknologi dan pembangunan infrastruktur pesisir.
- 2 Formulasi ini diilhami oleh pekerjaan David Harvey's dalam the 'fiksasi ruang'. "... menurut Harvey (2001), fiksasi ruang hanya merujuk "Kapitalisme yang tidak pernah puas untuk menyelesaikan kecenderungan krisis di dalamnya terhadap ekspansi geografis dan restrukturisasi geografis" (hlm. 24). ". Dan hasil lainnya kemudian (2017) oleh Ekers dan Prudham pada sosio-ekologikal fiksasi juga menyoroti cara-cara penting bahwa fiksasi ruang atas pembentukan modal dibentuk oleh produksi alam serta juga perjuangan sosial. Namun, kami juga mengakui bahwa penggunaan istilah ini merupakan eksplorasi, dan tentu saja membutuhkan pengembangan konseptual lebih lanjut. Meskipun demikian, kami melihatnya sebagai sebuah kerangka penting untuk memprovokasi refleksi politik kritis dan penelitian lebih lanjut tentang kepentingan ekonomi dan mekanisme akumulasi modal yang tertanam dalam agenda pertumbuhan biru.
- 3 Silver, J. et al., (1 June 2015). Blue Economy and Competing Discourses in International Oceans Governance. *The Journal of Environment & Development* 24, no. 2, 135–60. Tersedia di: <https://doi.org/10.1177/1070496515580797>.
- 4 Steinberg, P. (2001). *The Social Construction of the Ocean*. Cambridge: Cambridge University Press.
- 5 WFFP et al. (2014). *The global ocean grab: a primer*. Amsterdam: Transnational Institute.
- 6 Untuk diskusi mengenai 'konvergensi krisis' perampasan sumber daya, lihat McMichael, P. (2012) The landgrab and corporate food regime restructuring. *Journal of Peasant Studies*, 39 (3-4), 681-701 as well as Borrás et al. (2012) Land grabbing in Latin America and the Caribbean. *Journal of Peasant Studies*, 39 (3-4), 845-872. For an intervention on Ocean Grabbing, see Bennett et al. 2015 Ocean Grabbing, *Marine Policy*, 57, 61-68
- 7 Campling, L. & Colás, A. (2018). Capitalism and the sea: Sovereignty, territory and appropriation in the global ocean. *Environment and Planning D: Society and Space*, 36 (4), 776-794.
- 8 Steinberg, P. (1999). The maritime mystique: sustainable development, capital mobility and nostalgia in the world ocean. *Environment and Planning D: Society and Space* 17: 401-426.
- 9 Steinberg, 1999.
- 10 http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm
- 11 http://www.un.org/depts/los/reference_files/status2018.pdf
- 12 [https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Key provisions](https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Key%20provisions)
- 13 Campling, L. & Havice, E. (2014). The problem of property in industrial fisheries. *Journal of Peasant Studies*, 41 (5), 707-727.
- 14 [http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Setting Limits](http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Setting%20Limits)
- 15 data extracted from <http://www.marineregions.org>
- 16 Steinberg, 1999.
- 17 Ibid, 413.
- 18 Ibid, 413.
- 19 *Rio Ocean Declaration*. (2012). Co-Chairs' Statement of The Oceans Day at Rio+20. Diakses pada on 17 May 2018: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/pdf_Rio_Ocean_Declaration_2012.pdf
- 20 Silver et al, 137.
- 21 Silver et al., 137.
- 22 Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A. & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20:5, 595-616. Tersedia di: <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- 23 Clark Howard, B. (2018). Blue growth: Stakeholder perspectives. *Marine Policy*, Volume 87, 375-377. Tersedia di: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.002>
- 24 E.g. the Seychelles' Ministry of Finance, Trade and the Blue Economy and Kenya's State Department of Fisheries and Blue Economy under the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries.
- 25 For more on the BGI, see Barbesgaard, M. (2018). Blue growth: savior or ocean grabbing? *Journal of Peasant Studies*, 45(1), 130149. Tersedia di: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03066150.2017.1377186>
- 26 See The blue economy: Growth, opportunity and a sustainable ocean economy. (2015). Economist Intelligence Unit Briefing paper for the World Ocean Summit 2015. Tersedia di: [https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/Blue Economy_briefing paper_WOS2015.pdf](https://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/images/Blue%20Economy_briefing_paper_WOS2015.pdf)
- 27 Untuk kritik, lihat Lander, E. (2011). *The Green Economy: The world in sheep's clothing*. Amsterdam: TNI. Tersedia di: <https://www.tni.org/files/download/green-economy.pdf>
- 28 <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf>
- 29 <https://www.nrdc.org/stories/ocean-pollution-dirty-facts>
- 30 Ugarte, S. et al., (2017). SDGs mean business: how credible standards can help companies deliver the 2030 agenda. *The Global Goals For Sustainable Development*, Gland, Switzerland: WWF and ISEAL Alliance, 12. Tersedia di https://www.standardsimpacts.org/sites/default/files/WWF_ISEAL_SDG_2017.pdf
- 31 McAfee, K. (2016). Green economy and carbon markets for conservation and development: A critical view. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 16 (3), 333-353.
- 32 McAfee, K. (2016). The contradictory logic of global ecosystem services markets. *Development and Change*, 43 (1), 105-131.
- 33 Robertson, M. (2006). The nature that capital can see: science, state, and market in the commodification of ecosystem services. *Environment and Planning D: Society and Space*, 24 (3), 367-387.
- 34 McAfee, K. (1999). Selling Nature to Save It? Biodiversity and Green Developmentalism. *Environment and Planning D: Society and Space* 17, no. 2, 133–54.
- 35 Silver et al.
- 36 Ugarte et al., 13.
- 37 Silver et al., 5.
- 38 Directorate-General for the Environment of the European Commission. (November 2017). *A New Ocean of Commitments. Environment for Europeans*, 4.
- 39 Silver et al., 5.
- 40 Credit Suisse, WWF, and McKinsey & Company (2014). *Conservation Finance: Moving beyond donor funding toward an investor-driven approach*. Switzerland, 24. Tersedia di: <https://www.cbd.int/financial/privatesector/g-private-wwf.pdf>
- 41 Brumbaugh, R. & Patil, P. (22 May 2017). Sustainable Tourism Can Drive the Blue Economy: Investing in Ocean Health Is Synonymous with Generating Ocean Wealth. World Bank Blog *Voices: Perspectives on Development*. Tersedia di: <https://blogs.worldbank.org/voices/Sustainable-Tourism-Can-Drive-the-Blue-Economy>

- 42 Brumbaugh & Patil, 2017.
- 43 Standing, A. (August 2018). Meet Bond...Blue Bond; Saving your fish or bankrupting the oceans? Brussels: Coalition for Fair Fisheries Arrangements, 15. Tersedia di: <https://static1.squarespace.com/static/517fe876e4b03c6b86a4b81b/t/5ad19b9c352f53c87a025ef5/1523686354723/CFFA+paperBlue+Bonds.pdf>
- 44 Hoegh-Guldberg, O. (2015). Reviving the Ocean Economy: The case for action. Geneva: WWF International,44.
- 45 Silver & Campbell, 2018.
- 46 Standing, 11.
- 47 Standing, 26.
- 48 Silver & Campbell, 5.
- 49 Giron, Y. (2018). The other side of large-scale, no-take, marine protected areas in the Pacific Ocean. From Fache, E. and Pauwels, S. (eds) *Fisheries in the Pacific. The challenges of governance and sustainability*. Marseille, France: Cahiers du Credo, 77-117.
- 50 <http://www.thepresidency.gov.za/speeches/address-his-excellency-president-jacob-zuma-progress-made-respect-implementation-operation>
- 51 <https://www.abef2018.com/press-release/2018/3/23/example-media-item>
- 52 Potgieter, T., (2018). Oceans economy, blue economy, and security: notes on the South African potential and developments, *Journal of the Indian Ocean Region*, 14:1, 49-70.
- 53 <https://www.operationphakisa.gov.za/operations/oel/oilgas/pages/default.aspx>
- 54 Mallin, M.F. (23 April 2018). From Sea-Level Rise to Seabed Grabbing: The Political Economy of Climate Change in Kiribati. *Marine Policy*. Tersedia di: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.04.021>
- 55 Mallin, 2018.
- 56 Mallin, 2018.
- 57 Quoted in Mallin, 2018.
- 58 Quoted in Mallin, 2018.
- 59 FAO. (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018: Meeting the sustainable development goals. Rome, Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- 60 Boonstra, W.J., Valman, M. & Björkvik, E. (1 January 2018). A Sea of Many Colours – How Relevant Is Blue Growth for Capture Fisheries in the Global North, and Vice Versa? *Marine Policy* 87, 342. Tersedia di: <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.007>
- 61 Belton, B. and S. H. Thilsted. 2014. Fisheries in transition: Food and nutrition security implications for the global South. *Global Food Security*, 3(1), 59–66. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2013.10.001>
- 62 *ibid.*
- 63 Global institutions including the World Economic Forum (<https://www.weforum.org/agenda/2018/09/5-ways-to-guarantee-sustainable-aquaculture/>) and FAO (The State of World Fisheries and Aquaculture 2018) predict increasing demands for fish products globally.
- 64 FAO. (2014 & 2016). Cited in Ertör, I. & Ortega-Cerdà, M. The Expansion of Intensive Marine Aquaculture in Turkey: The Next-to-last Commodity Frontier? *Journal of Agrarian Change*, 2. Diakses pada 14 August 2018: <https://doi.org/10.1111/joac.12283>
- 65 Table 3 in Tacon, A.G.J. & Metian, M.. (2008). Global overview on the use of fish meal and fish oil in industrially compounded aquafeeds: Trends and future prospects. *Aquaculture* 285, 146–158.
- 66 FAO. (2018). The State of World Fisheries and Aquaculture 2018: Meeting the sustainable development goals. Rome, Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- 67 TNI, Afrika Kontakt & Masfundise. (2014). The Global Ocean Grab: A Primer. Amsterdam: The Transnational Institute.
- 68 Ertör & Ortega-Cerdà, 2.
- 69 Ertör & Ortega-Cerdà, 11.
- 70 Ertör & Ortega-Cerdà, 9.
- 71 Ertör & Ortega-Cerdà, 12.
- 72 Ertör & Ortega-Cerdà, 14.
- 73 Area aksi pada Our Oceans Conference 2017: “Ada potensi besar yang belum dimanfaatkan. Beberapa bidang seperti perikanan budidaya, energi terbarukan lepas pantai, bioteknologi biru, wisata pantai dan sumber daya mineral laut memegang peluang besar untuk mendorong pertumbuhan biru dan mendorong pembangunan inklusif dengan menciptakan peluang kerja baru.” <https://www.ourocean2017.org/areas-action>
- 74 OECD. (2016). The Ocean Economy in 2030. Paris: OECD Publishing. Tersedia di : <http://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-en>
- 75 OECD 2016, 20
- 76 Watts, M. (2012). A Tale of Two Gulfs: Life, Death, and Dispossession along Two Oil Frontiers. *American Quarterly* 64, no. 3, 441. <https://doi.org/10.1353/aq.2012.0039>
- 77 Skenario Kebijakan Baru dari the International Energy Agency mengeksplorasi evolusi dari system energy global yang sejalan dengan kerangka kebijakan yang telah ada dan niat yang diumumkan.
- 78 IEA (2017). Offshore Energy Outlook 2017. International Energy Agency, Paris. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2017Special_Report_OffshoreEnergyOutlook.pdf
- 79 Watts, 441.
- 80 Government of the Netherlands. (2015). Policy Document on the North Sea 2016-2021. 19. Tersedia di: <https://www.government.nl/documents/policy-notes/2015/12/15/policy-document-on-the-north-sea-2016-2021-printversie>
- 81 *Ibid.*, 7.
- 82 *Ibid.*, 95.
- 83 Dutch Government. Policy Document on the North Sea 2016-2021. 34.
- 84 *Ibid.*, 26.
- 85 <https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/exports-of-oil-and-gas/>
- 86 Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries & Norwegian Ministry of Petroleum and Energy. (2017). New Growth, Proud History; The Norwegian Government’s Ocean Strategy. 6. Tersedia di: <https://www.regjeringen.no/contentassets/00f5d674cb684873844bf3c0b19e0511/the-norwegian-governments-ocean-strategy---new-growth-proud-history.pdf>
- 87 *Ibid.*, 17.
- 88 Sengupta, S. (22 December 2017). Both Climate Leader and Oil Giant? A Norwegian Paradox. *The New York Times*, section World. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2017/06/17/world/europe/norway-climate-oil.html>
- 89 <https://www.regjeringen.no/contentassets/00f5d674cb684873844bf3c0b19e0511/the-norwegian-governments-ocean-strategy---new-growth-proud-history.pdf>

- 90 Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries & Norwegian Ministry of Petroleum and Energy, 17.
- 91 <http://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-en> p 37
- 92 Sebuah perusahaan penambangan laut dalam yang berbasis di Kanada berada di garis depan industri yang ditetapkan untuk memulai produksi di Zona Ekonomi Eksklusif Papua Nugini pada tahun 2019. Lebih lanjut lihat: <https://www.theguardian.com/environment/2017/jun/04/is-deep-sea-mining-vital-for-greener-future-even-if-it-means-destroying-precious-ecosystems>
- 93 ISA Secretary General speech on 12 February 2018, London: http://dsmobserver.com/wp-content/uploads/2018/03/sg-statement_0-1.pdf
- 94 Woody, T. (6 September 2017). Seabed Mining: The 30 People Who Could Decide the Fate of the Deep Ocean. *News Deeply* (blog). Tersedia di: <https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2017/09/06/seabed-mining-the-24-people-who-could-decide-the-fate-of-the-deep-ocean>
- 95 <https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2017/09/06/seabed-mining-the-24-people-who-could-decide-the-fate-of-the-deep-ocean>
- 96 Woody, T. (25 July 2018). Hurry Up and Wait: Big Decisions on Seabed Mining Remain Unresolved. *News Deeply* (blog). Tersedia di: <https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2018/07/25/hurry-up-and-wait-big-decisions-on-seabed-mining-remain-unresolved>.
- 97 Ibid.
- 98 Hannington cited in OECD (2016). *The Ocean Economy in 2030*. Paris: OECD Publishing. Tersedia di: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264251724-en>
- 99 Fiji, the Republic of the Marshall Islands, the Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Papua New Guinea, joined by the Republic of Maldives and Timor-Leste.
- 100 H.E. Mr. Robert G.. Aisi, Permanent Representative of Papua New Guinea to the UN speaking on behalf of the Pacific Small Island Developing States (Pacific SIDS) represented at the United Nations, namely Fiji, the Republic of the Marshall Islands, the Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, and my own country, Papua New Guinea. We are honored to also be joined by the Republic of Maldives and Timor-Leste. 2011. Tersedia di: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18805PSIDS.pdf>
- 101 <https://www.isa.org.jm/news/isa-co-organizes-side-event-raise-awareness-potential-benefits-small-island-developing-states>
- 102 <https://www.isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors/overview>
- 103 http://www.nautilusminerals.com/irm/PDF/1107_0/NautilusMineralsDefines410milliontonneInferredMineralpg3
- 104 <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/13424Inputs%20to%20concept%20papers%20ISA%2022.03.2017.pdf> pg 1
- 105 Coll cited in Watts, 441.
- 106 Watts, 441.
- 107 Carton, W. (2017). Dancing to the Rhythms of the Fossil Fuel Landscape: Landscape Inertia and the Temporal Limits to Market-Based Climate Policy. *Antipode*, 49 (1), 43-61.
- 108 Mitchell, D. (2012). *They Saved the Crops: Labor, Landscape, and Struggle Over Industrial Farming in Bracero-Era California*, *Geographies of Justice and Social Transformation*, Athens and London: University of Georgia Press, 167.
- 109 Harvey, D. (2006). *Limits to Capital*. London: Verso, 220.
- 110 E.g. the UK-based oil and gas company Rockhopper has sued Italy over the state's refusal to grant a concession for offshore drilling in the Adriatic Sea. See Eberhardt, P., Olivet, C., & Steinfort, L. (2018). *One Treaty to Rule Them All: The ever-expanding Energy Charter Treaty and the power it gives corporations to halt the energy transition*. Brussels/Amsterdam: Corporate Europe Observatory and Transnational Institute, 14.
- 111 <https://www.ospar.org/convention/text>
- 112 Pascual, M. & Greenhill, L. (16 February 2018). MSP as a Tool to Support Blue Growth. Sector Fiche: Oil and Gas. Brussels: European MSP Platform for the European Commission Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, Sustainable Projects, ECORYS, Thetis, University of Liverpool, NIMRD and Seascope Consultants, 191. Tersedia di: https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/mspforbluegrowth_sectorfiche_oilgas.pdf
- 113 Gabbatiss, J. (29 April 2018). Cost of Dismantling North Sea Oil and Gas Likely to Be Double Government Target. *The Independent*. Tersedia di: <https://www.independent.co.uk/environment/fossil-fuels-north-sea-oil-gas-decommissioncost-double-government-a8326046.html>
- 114 Salardi, E. et al. (20 February 2018). A New Economic And Ecological Concept For Offshore Decommissioning. *Exploration & Production*. Tersedia di: <https://www.epmag.com/new-economic-and-ecological-concept-offshore-decommissioning-1684901>
- 115 Pascual & Greenhill, 2018.
- 116 Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland along with Luxembourg and Switzerland.
- 117 <http://www.vliz.be/projects/mermaidproject/>
- 118 Woody, T. (25 July 2018). Hurry Up and Wait: Big Decisions on Seabed Mining Remain Unresolved. *News Deeply* (blog). Tersedia pada: <https://www.newsdeeply.com/oceans/articles/2018/07/25/hurry-up-and-wait-big-decisions-on-seabed-mining-remain-unresolved>.
- 119 Ibid.



TNI adalah lembaga advokasi dan penelitian internasional yang berkomitmen untuk membangun keadilan, demokrasi dan keberlanjutan bumi. Selama lebih dari 40 tahun. TNI telah banyak bekerja dengan membangun hubungan yang unik dengan gerakan sosial, serta melibatkan para sarjana dan pembuat kebijakan.

www.TNI.org